

gerai info

Edisi XI | Februari 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

DARI MEJA REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Bila pada edisi Januari 2011 lalu kita menyorot perihal apa itu inflasi hingga dampaknya bagi kehidupan masyarakat luas, pada edisi Februari, pembahasan itu kita lanjutkan dengan sedikit lebih dalam yakni bagaimana inflasi itu dikelola oleh Bank Indonesia. Sejak tahun 2002, BI mengadopsi apa yang disebut Inflation Targeting Framework (ITF). Apa itu ITF akan dijabarkan secara gamblang pada Rubrik FOKUS. Dari bahasan ini, diharapkan pembaca akan memahami dengan metode seperti apa bank sentral mengendalikan inflasi.

Sedangkan pada rubrik-rubrik lainnya, misalnya IKHTISAR akan mengurai jurus bagaimana BI meredam gejolak inflasi agar tidak menjadi semakin liar. Salah satu instrumen yang lazim dipakai dalam menjinakkan inflasi adalah BI Rate. Ini adalah suku bunga acuan bagi pasar uang dalam menentukan tingkat bunga mereka yang diharapkan akan merembes menjadi acuan bunga bank. Pada Rubrik EDUKASI, Anda kami ajak untuk menelusuri bagaimana bank sentral meracik adonan BI Rate hingga keluar angka resmi setiap bulan. Penelusuran akan diteruskan dengan membuka tabir penentuan angka proyeksi inflasi (Rubrik WAWASAN) dan bagaimana BI mengendus ekspektasi publik akan inflasi (Rubrik RUTING BACA).

Kami berharap dengan sajian dua edisi berturut-turut menyorot inflasi, setidaknya pemahaman pembaca semakin *elink* dan mahfum akan 'mahluk' yang namanya inflasi. ●

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas Bank Indonesia

Redaksi
Penanggung Jawab: Dyah NK. Makhijani
Pemimpin Redaksi: Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana: Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Tutut Dewanto, Risanthy Uli N,
Dedy Irianto, Dyah Woelandari

Alamat Redaksi
Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317 / 3817187
email : humasbi@bi.go.id, website: www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

■ Inflation Targeting Framework (ITF):

Koridor Menuju Pengendalian Inflasi

Inflasi itu copet! Itu kata seorang wartawan senior sebuah koran besar di negara ini. Inflasi diteriaki copet karena memang modus operandi dalam menggerus nilai uang dilakukan secara diam-diam dan tak disadari oleh si empunya duit (*Lihat: Gerai Info, April 2010*). Untuk menghadang agar inflasi itu tidak semakin liar, banyak cara yang dipakai untuk meredam dan menjinakkannya. Salah satu pendekatan yang saat ini banyak dipakai di sejumlah negara dan terbilang cukup berhasil—antara lain di Selandia Baru dan Chile—dikenal sebagai *Inflation Targeting Framework* (ITF).

Apa *sib* yang dimaksud dengan ITF itu? Bahasa gampangnya, ITF adalah prosedur yang mengatur bagaimana kebijakan moneter itu dirumuskan oleh bank sentral untuk menggiring si copet inflasi menuju satu titik sasaran yakni inflasi yang rendah dan stabil. Oleh karena itu bank sentral kudu mempunyai sasaran inflasi yang ingin dicapai dan diumumkan ke publik dalam rangka menuntun ekspektasi publik. Pengumuman itu juga mengandung arti bahwa bank sentral memberikan komitmen kepada publik bahwa setiap kebijakan selalu mengacu pada target tersebut.

Lantas kenapa BI memilih ITF? Alasan formal karena Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang BI menitip amanat agar bank sentral berupaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang terlihat dengan kasat mata publik dari stabilitas harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Pendekatan yang pas dan sudah teruji dalam menjinakkan inflasi diberbagai negara adalah ITF. Dengan ITF, BI fokus pada upaya mengendalikan inflasi. Selain itu, ITF dipilih juga karena ada hasrat bank sentral untuk menggiring inflasi nasional menjadi rendah seperti negara-negara tetangga. Inflasi rendah akan membawa masyarakat lebih sejahtera. BI memilih ITF juga dengan pertimbangan cara ini memiliki mekanisme yang jelas, akuntabel, transparan yang semua itu bermuara pada menguatnya kredibilitas kebijakan moneter.

Bila *melongok* sejenak akan catatan sejarah bank sentral, sejak 2002 BI sudah memakai ITF dan tiga tahun kemudian (2005) diperkuat dengan instrumen BI Rate sebagai sasaran operasional

kebijakan moneter. Kenapa BI memakai BI Rate? BI Rate adalah suku bunga acuan bagi pelaku pasar uang dalam menentukan tingkat bunga di Pasar Uang Antarbank (PUAB) yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga jangka panjang. Mekanisme inilah yang diharapkan dapat menjadi sinyal bagi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan menetapkan BI Rate diambil dalam forum Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di BI yang rutin digelar setiap bulan.

Adalah sebuah kelaziman semata apabila pilihan akan sebuah pendekatan bagaimana inflasi dapat dijinakkan menyertakan pula prasyarat yang kudu dipenuhi agar berjalan efektif. Salah satu prasyarat itu, misalnya, bank sentral di negara mana pun yang memilih ITF sebagai kerangka kebijakan moneternya haruslah independen dalam melaksanakan kebijakannya. BI sudah menjadi institusi independen sejak disahkannya UU No.23 Tahun 1999 tentang BI. Berbekal independensi itu, keputusan yang diambil BI tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Sekarang coba bayangkan *deb* bila BI tidak independen, rasanya sulit juga mencapai inflasi yang rendah karena ada tarik-menarik kepentingan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Prakondisi lainnya, bahwa bank sentral tidak membiayai defisit anggaran pemerintah karena hal itu dikhawatirkan akan mendorong laju permintaan (*demand*) yang tak terkontrol.

Meski semua prasyarat itu semua sudah terpenuhi, toh dalam praktiknya, urusan pengendalian inflasi bukanlah tugas yang enteng. Sebab, selaku otoritas moneter, BI hanyalah mungkin menjaga dan mempengaruhi sumber-sumber pemicu inflasi dari sisi permintaan (*demand pull inflation*). Sedangkan dalam kenyataan keseharian, ternyata sumber pencetus inflasi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di sisi suplai dan distribusi (*cost push inflation*) serta penyesuaian harga komoditas strategis.

Nah, apabila upaya BI dalam mengelola inflasi melalui ITF bisa sampai di angka rendah, itu artinya tingkat kesejahteraan masyarakat terjaga. Siapa *sib* yang tak senang kalau angka inflasi rendah yang maknanya harta kekayaan masyarakat tidak melorot dicuri copet inflasi. ●

Gaya Arif BI Mengekang Inflasi

Cara menentukan hasil. Itu kata sebuah petuah kuno. Kalau cara seseorang hendak menjadi juara kelas disertai disiplin tinggi dalam belajar, kemungkinan besar tujuan itu akan tercapai. Petuah yang sama pun berlaku ketika Bank Indonesia menasar target inflasi rendah melalui kebijakan moneter bertajuk *Inflation Targeting Framework* (ITF). Bagaimana agar tujuan itu tercapai, cara amat menentukan. Tapakan awal proses ITF dimulai saat BI dan Pemerintah urun-rembuk menentukan di angka berapa idealnya angka sasaran inflasi angka sasaran inflasi yang optimal bagi perekonomian. Hal ini penting agar angka sasaran inflasi itu tetap mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Selain itu, penentuan angka inflasi juga didasarkan pada aspek kepentingan mengarahkan ekspektasi publik kepada inflasi yang rendah dan stabil untuk jangka menengah-panjang. Setelah itu barulah Pemerintah menyampaikan angka inflasi tersebut ke publik.

Setelah keluar angka inflasi yang ingin disasar, baik BI maupun Pemerintah sama-sama berupaya menjaga agar ruang gerak inflasi tidak melenceng dari yang sudah dipatok. BI setiap saat memantau sepak-terjang inflasi melalui forum Rapat Dewan Gubernur (RDG). Manakala terindikasi ada pergerakan inflasi ke depan berada di luar target, BI akan merespon dengan mengambil langkah antisipatif entah menaikkan atau menurunkan BI Rate. Putusan penetapan angka BI Rate itu secara langsung akan menjadi acuan bunga di Pasar Uang Antarbank (PUAB). Untuk memagari agar ruang gerak bunga PUAB mendekati atau sama dengan BI Rate, bank sentral memasang rambu-rambu berupa penentuan batas atas (*ceiling*) dan bawah (*floor*). Bila bunga PUAB melayang di atas BI Rate yang artinya kondisi pasar sedang seret likuiditas, maka BI akan menggulontor dana (baca: BI sediakan fasilitas *lending* dana ke bank yang membutuhkannya). Begitu pula sebaliknya,

sewaktu bunga PUAB anjlok (pasar sedang banjir dana), BI akan menyedot kelebihan dana.

Yang juga tak kalah penting dari tahapan proses kerja kebijakan moneter melalui ITF tadi adalah mengkomunikasikan langkah-langkah yang sudah ditempuh bank sentral kepada publik. Misalnya, ketika RDG BI memutuskan menaikkan, menurunkan atau mempertahankan BI Rate, publik perlu dijelaskan latar belakang keputusan yang diambil bank sentral agar ada pemahaman yang utuh. Nah, dengan pemahaman publik yang memadai tadi diharapkan akan ikut membangun ekspektasi publik yang positif sehingga mampu menjaga gerak langkah inflasi lebih terkendali. Komunikasi bank sentral yang cair dan baik kepada pemangku kepentingannya, ikut menentukan keberhasilan pengelolaan kebijakan moneter. Sebab, sebaik apapun proses pengambilan keputusan kebijakan moneter bila komunikasi ke publiknya amburadul, ya akan babak belur.●



Inflasi Dan Gaji Gubernur Bank Sentral

Ir. Difi A. Johansyah, MBA *)

Inflasi adalah fenomena moneter, teorinya. Moneter adalah gaweannya bank sentral karena terkait uang beredar. Oleh karena itu logikanya inflasi adalah tanggungjawab bank sentral. Logika ini bisa lebih jauh lagi mengantarkan kita ke sebuah legenda. Legenda yang berasal dari Selandia Baru, dimana katanya pernah gaji gubernur bank sentral negara kiwi tersebut (*Reserve Bank of New Zealand*) dikaitkan dengan pencapaian inflasi. Lebih ekstrim lagi, pencarian kandidat Gubernur Bank Sentral Selandia baru dilakukan melalui koran dan gubernur terpilih haruslah membuat kontrak publik berupa pengumuman sasaran inflasi.

Lho, kenapa untuk urusan inflasi ini kita harus menengok Selandia Baru, negara yang relatif tidak begitu dikenal di ekonomi internasional. Alasannya, walaupun relatif kecil Selandia Baru adalah negara pertama yang bank sentralnya secara tegas menargetkan pencapaian inflasi. Akibatnya perhatian banyak ekonom tertuju ke negara ini dan tidak sedikit negara lain yang mengikuti langkah Selandia Baru.

Namun apa anehnya kalau bank sentral

mengumumkan sasaran inflasinya kalau memang tugas bank sentral adalah untuk mengendalikan moneter dan inflasi seperti logika di atas. Ternyata setelah hampir setengah abad ilmu moneter berkembang, kaitan antara moneter (jumlah uang beredar) dan inflasi tidak begitu jelas sehingga sebagian bank sentral hanya berhenti kepada tugas mengatur uang beredar, tidak jauh sampai mencapai sasaran inflasi. Ada tugas atau urusan bank sentral yang lain yang mengganggu hubungan moneter dengan inflasi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, dan akhir-akhir ini menjaga kestabilan sistem keuangan. Problemnnya, inflasi merupakan “biaya” dari pertumbuhan ekonomi.

Nah, disinilah manajemen bank sentral menjadi sebuah seni pengambilan keputusan. Sangat ekstrim memerangi inflasi, bank sentral dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya kalau harus menaikkan suku bunga yang tidak populer. Dan, pada akhirnya bank sentral harus berhadapan dengan kritik pengusaha dan politikus serta pihak-pihak yang

tidak suka dengan kebijakan yang tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, bersikap lunak terhadap inflasi dapat menjatuhkan kredibilitas bank sentral yang pada gilirannya bermuara pada gangguan terhadap kestabilan perekonomian dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa membiarkan tekanan inflasi merupakan sesuatu yang tabu bagi bank sentral. Jadi gimana *donk*? Inilah seninya. Seorang Gubernur Bank Sentral harus mampu menggunakan otak kanan dan otak kirinya untuk mencari solusi terbaik dalam mengkombinasikan upaya menjaga kestabilan inflasi dengan upaya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang pas.

Nah, kalau begitu wajar *donk* kalau gaji Gubernur Bank Sentral harus tinggi seperti contoh di Selandia Baru. Sebagian gaji untuk ilmu dan intuisi atau pengalamannya, dan sebagian lagi untuk dikritik karena tidak populer. Hmmm....●

*) Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Direktorat Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat



Menyibak Tabir Proyeksi Inflasi

Arief Hartawan, SE, MA *)

Bank Indonesia memilih *Inflation Targeting Framework* (ITF) sebagai kerangka kerja kebijakan moneter. Memformulasi proyeksi angka inflasi adalah proses penting dalam ITF karena sifatnya yang melongok ke depan (*forward looking*). Hal ini dimaksudkan agar respons kebijakan diarahkan agar proyeksi inflasi kembali ke dalam sasarannya. BI bersama Pemerintah sepakat mematok besaran angka inflasi yang ingin dicapai sejak 2010 hingga 2012 masing-masing sebesar 5%, 5% dan 4,5% dengan deviasi +/- 1%. Itu artinya BI dan Pemerintah akan mengerahkan semua daya mengejar target inflasi itu.

Untuk itu, prasyarat awal agar ITF bisa berjalan efektif adalah menentukan besaran proyeksi angka inflasi. Lantas, seperti apa proses penyusunan proyeksi angka inflasi oleh bank sentral? Memang harus diakui proses mengolah hingga keluar angka proyeksi inflasi tidaklah sederhana. Langkah awal ditapaki dengan menetapkan asumsi-asumsi. Asumsi berguna sebagai panduan agar proyeksi yang dilakukan mendekati kondisi riil sehingga pilihan kebijakan yang diambil efektif untuk meredam inflasi. Asumsi-asumsi bisa dibagi dalam dua bagian besar, yaitu asumsi eksternal dan internal.

Penyusunan asumsi eksternal bersumber dari beragam informasi. Misalnya, proyeksi angka pertumbuhan ekonomi dunia, gejolak harga minyak mentah dunia hingga pergerakan harga-harga komoditas pangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional seperti gandum, beras, kedelai. Asumsi yang digunakan juga mempertimbangkan *stance* kebijakan moneter negara lain seperti inflasi serta suku bunga.

Sedangkan proses penyusunan asumsi berbasis internal biasanya merujuk kebijakan fiskal Pemerintah termasuk rencana kenaikan tarif yang diatur oleh pemerintah (listrik, air, telepon) maupun *roadmap* kebijakan energi ke depan seperti pembatasan BBM bersubsidi serta konversi minyak tanah. Bank sentral juga mencermati pergerakan sepak terjang nilai tukar rupiah. Asumsi-asumsi ini bisa diperoleh

melalui berbagai forum seperti Tim Pemantau & Pengendali Inflasi (TPI) Pusat dan Daerah (TPID).

Berbekal dua asumsi tadi, BI mengolahnya menjadi suatu proyeksi awal (*baseline*) angka inflasi. Bank sentral juga mencermati sepak-terjang nilai tukar karena informasi itu juga menjadi bahan rujukan dalam menentukan proyeksi inflasi. Dalam menyusun asumsi-asumsi tersebut, di internal BI dilakukan dengan proses penetapan asumsi melalui jalur yang panjang. Pembahasan dimulai

"Bank sentral juga mencermati sepak-terjang nilai tukar karena informasi itu juga menjadi bahan rujukan dalam menentukan proyeksi inflasi."

dari diskusi antar-tim di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (DKM) yang ditindaklanjuti rekonsiliasi data dan informasi dengan satker lain di bidang moneter.

Setelah urusan menetapkan asumsi-asumsi rampung, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi dengan memakai model-model ekonomi yang ada, guna menghasilkan keluaran berupa angka inflasi dan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Tapakan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil olahan tersebut ke pimpinan untuk dimintakan penilaian profesional. Penilaian tersebut diperlukan mengingat tidak ada model yang bisa dikatakan dapat memberikan hasil yang sangat akurat untuk setiap kondisi, walaupun model dapat memberikan panduan untuk menentukan pilihan kebijakan yang diambil (*essentially, all models are wrong, but some are useful*-George Edward Pelham Box).

Inflasi yang dihasilkan dari simulasi kemudian disandingkan dengan target inflasi yang telah ditetapkan. Manakala

diketahui ada deviasi antara angka proyeksi dan target sasaran, disinilah diperlukan respons kebijakan untuk menggiring angka proyeksi inflasi ke koridor sasarannya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sektor eksternal serta sistem keuangan.

BI juga menyadari bahwa kebijakan moneter yang diambil memiliki *time-lag* sehingga respon terhadap kebijakan moneter yang ditetapkan saat ini, baru akan tercermin antara 4 (empat) hingga 6 (enam) triwulan ke depan. Demikian pun tingkat inflasi yang dirasakan saat ini merupakan dampak dari kebijakan moneter yang diambil kurun waktu 1 (satu) hingga 1,5 (satu setengah) tahun sebelumnya. Dengan melihat semua hal di atas, evaluasi kebijakan dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan seiring ketersediaan data dan informasi PDB. Hasil proyeksi *base line* tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses simulasi respon kebijakan untuk menyusun kombinasi kebijakan yang diperlukan agar target inflasi dapat dicapai.

BI Rate adalah instrumen utama pengendalian inflasi dalam kerangka ITF. Namun, ITF bukan suatu konsep yang statis apalagi melihat dampak krisis keuangan beberapa waktu yang lalu. ITF tidak hanya melihat suku bunga sebagai satu satunya instrumen pengendalian inflasi. Diperlukan bauran kebijakan (*policy mix*), yaitu kombinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan (*macroprudential*) sebagai cara untuk mencapai keseimbangan target inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Implementasi dari bauran kebijakan antara lain dengan pengaturan giro wajib minimum (GWM), penyesuaian periode SBI dan posisi saldo harian pinjaman luar negeri (PLN) bank jangka pendek. Ke depan, ITF akan terus mengikuti perkembangan jaman. Tetapi, pilihan kerangka kebijakan moneter yang paling tepat saat ini dan ke depan hanya bangsa Indonesia sendiri yang tahu, dan pilihan tersebut ada di tangan Bank Indonesia. ●

*) Peneliti Ekonomi Madya di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



Meracik 'Adonan' BI Rate

Ir. Clarita Ligaya, MIA *)

Ada ritual bulanan Bank Indonesia yang kerap menjadi perhatian masyarakat dan sorotan media massa. Itu adalah penetapan BI Rate. Biasanya menjelang keluar angka resmi, berbagai kalangan menyembulkan pandangan dan harapan akan di angka berapa idealnya BI Rate. Terkadang pandangan publik yang mencuat di sejumlah koran sejalan dengan pertimbangan Rapat Dewan Gubernur BI yang adalah forum tertinggi di internal bank sentral dalam menetapkan angka BI Rate. Tapi juga ada kalanya pendapat publik tadi justru berseberangan langkah dengan putusan bank sentral. Ambil contoh hasil penetapan BI Rate, 4 Februari 2011 lalu. Ekspektasi sebagian publik berharap, BI menurunkan atau setidaknya mempertahankan angka BI Rate yang ada di level 6,50%. Namun apa lacur bahwa BI justru menaikkan 25 basis poin angka itu menjadi 6,75%.

Manakala putusan BI itu tak memenuhi ekspektasi dan harapan sebagian publik, semakin ramai saja opini yang nadanya mempertanyakan, "kok malah naik sih?" Wajarlah bila publik pun bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang menjadi latar pertimbangan bank sentral dalam mengambil putusan tersebut. Sekarang mari kita tengok dapur bank sentral yang mempersiapkan dan meracik aneka bahan baku guna diolah menjadi suguhan berupa rekomendasi ke forum RDG BI. Biasanya, jauh-jauh hari sebelum RDG digelar, Direktorat Riset dan Kebijakan Moneter (DKM) menyiapkan analisis dan rekomendasi yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama satuan kerja lain di BI. Banyak aspek yang menjadi bahan pertimbangan satker dalam mempersiapkan laporan mereka. Misalnya, satker-satker di BI akan mencermati perkembangan dan prospek ekonomi dunia. Satu catatan penting terkait hal itu, bahwa prospek ekonomi dunia terus membaik dan pertumbuhannya diperkirakan lebih tinggi.

Setelah menepi prospek ekonomi dunia, arah sorotan beralih ke perkembangan ekonomi domestik. Hasil teropong itu memperlihatkan gambaran bahwa kecenderungan perekonomian Indonesia tahun 2011 sungguh memberi harapan positif seperti ditunjukkan taksiran laju pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama dapat mencapai angka 6,4%. Optimisme itu didasarkan masih kuatnya permintaan domestik dan membaiknya sisi eksternal.

Coba lihat saja kinerja ekspor nasional yang cukup tinggi sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Begitu pula kinerja impor pun ikut bergairah seiring pergerakan roda perekonomian nasional yang meningkat. Catatan di atas masih bisa diimbangi perkembangan transaksi modal dan finansial yang membukukan surplus besar yang salah satu penyanggah utamanya adalah derasnya arus masuk investasi langsung (FDI/*Foreign Direct Investment*). Dan kalau mau melihat perspektif lebih luas lagi, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan pertama 2011 diperkirakan mencatat surplus besar. Begitu pula bila melihat posisi cadangan devisa per 31 Januari terbilang sangat memadai yakni US\$95,3 miliar atau setara 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

Informasi tersebut di atas menjadi bahan baku pertimbangan satker-satker di BI sebelum melepas rekomendasi ke RDG. Tapi bahan baku ramuan rekomendasi kebijakan tadi tidaklah berhenti hanya sampai di situ. Masih banyak lagi daftar panjang yang harus dipertimbangkan. Ambil contoh, perkembangan teranyar di industri perbankan. BI mencatat perkembangan positif pertumbuhan ekonomi nasional tidaklah terlepas dari sumbangsih stabilitas sistem keuangan yang boleh dibalang tetap terjaga, dan kian membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Kalau info itu digali lebih dalam lagi, profil gambaran sektor perbankan memperlihatkan wajah yang semakin solid yang dengan kasat mata dapat dilihat dari tingginya rasio kecukupan modal (CAR/*Capital Adequacy Ratio*) dan terpeliharanya rasio kredit bermasalah (NPL/*Non Performing Loan*) pada level di bawah 5%. Peran intermediasi perbankan untuk semua jenis kredit terus meroket hingga akhir Desember 2010 yang tumbuh 22,8% (*yoy/year-on-year*).

Bahan baku kajian satker-satker di BI pun masih ditambah dengan mencermati perkembangan nilai tukar rupiah yang terbilang relatif terkendali meski pada Januari 2011 sempat mengalami tekanan. Tekanan itu bersumber adanya aliran modal keluar yang dipicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap melonjaknya tekanan inflasi. Rupiah sempat terhempas di level Rp9.034 per dolar AS dengan sedikit terjadi fluktuasi. Meski begitu BI tetap yakin arus modal keluar itu hanyalah sementara, apalagi bila melihat penilaian lembaga *rating* Moody's Investor Service yang

menaikkan *Sovereign Credit Rating* Indonesia menjadi Ba1 dengan *outlook* stabil hingga mendekati level *Investment Grade* (IG) (*Libat: Gerai Info edisi Agustus 2010*).

Item penting lain yang lazim dicermati adalah pergerakan inflasi. BI melihat seiring prospek ekonomi nasional yang semakin kuat juga membawa konsekuensi berupa melonjaknya tekanan inflasi. Misalnya, angka inflasi IHK pada Januari mencapai 0,89% (mtm) atau 7,02% (yoy). Sebagaimana diketahui, perhitungan inflasi IHK didasarkan pada tiga kelompok inflasi yakni *volatile foods*, *administered price* dan inflasi inti (*core inflation*) (*Libat: Gerai Info edisi Januari 2011*). Kita semua mahfum bahwa penyumbang terbesar kenaikan inflasi adalah tingginya inflasi kelompok *volatile foods* yang membukukan angka 18,25% (yoy). Melambungnya inflasi itu dikarenakan gangguan produksi dan distribusi bahan pangan yang berlanjut, khususnya beras dan bumbu dapur. Sementara itu, kalau menengok angka inflasi dari kelompok *administered prices* memperlihatkan angka yang terbilang moderat yakni 5,21% (yoy). Begitu pula kelompok inflasi inti yang relatif terkendali pada tingkat yang cukup rendah, 4,18% (yoy). Catatan yang dapat disampaikan terkait inflasi ini, ke depan apabila tidak ditempuh langkah-langkah kebijakan untuk meredakan, bakal muncul risiko lonjakan inflasi di tahun 2011 yang melampaui sasaran 5% +/- 1%.

Setelah semua materi tersebut di atas ditelaah dan sebelum satker-satker di BI merilis rekomendasi ke RDG, satu tahapan lagi yang dilakukan yakni *meng-up date* perkembangan terkini seperti kenaikan harga minyak dunia. Begitu pula lonjakan harga bahan pangan seperti gandum, jagung, kedelai dan minyak sawit mentah (CPO/*crude palm oil*) akibat anomali iklim. Kenaikan harga pangan itu sudah barang tentu membawa konsekuensi kenaikan inflasi karena sebagian produk pangan nasional masih diimpor (*imported inflation*). Sementara dari dalam negeri perkembangan mutakhir yang kudu diwaspadai adalah rencana pembatasan BBM bersubsidi pada akhir Maret untuk Jabodetabek dan awal Juli untuk Jawa-Bali yang memicu tekanan inflasi (*administered price inflation*).

Nah, setelah mengetahui semua besaran informasi yang mendahului sebelum BI Rate ditetapkan RDG, dipahami bahwa keputusan tersebut bukanlah langkah dadakan. Penetapan BI Rate telah melewati proses panjang sehingga adonan yang diracik itu betul-betul matang hingga siap untuk disajikan. ●

*) Peneliti Ekonomi Madya di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



Menakar Ekspektasi

Sapto Widyatmiko, SE, MSc *)

Berbicara tentang ekspektasi, sebagian besar orang akan bertanya apakah itu ekspektasi dan bagaimana mengukurnya. Pertanyaan itu sah karena ekspektasi bukanlah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah terekam dalam sejarah sehingga belum terukur. Ekspektasi adalah harapan terhadap sesuatu untuk terwujud di masa depan sesuai yang diperkirakan. Namun, sebelum berpijak lebih lanjut perlu dipastikan dulu bahwa “sesuatu yang diperkirakan” itu bukan berarti sama dengan sesuatu yang diinginkan. Orang boleh saja berekspektasi harga akan naik tapi bukan berarti mereka menginginkan harga akan naik.

Semakin lama orang semakin pintar melakukan ekspektasi karena mereka semakin banyak memahami berbagai faktor dan keterkaitannya satu sama lain. Pemahaman menjadi semakin tinggi sejalan dengan keterbukaan informasi. Adakalanya harapan itu terwujud, adakalanya itu tidak. Namun, berbeda dengan dugaan yang hanya menerka tanpa dasar, ekspektasi mengharapakan sesuatu melalui dasar asumsi dan perhitungan yang terukur. Dengan kata lain, apabila meleset, boleh jadi ekspektasi dibuat dengan asumsi yang salah, atau perhitungannya yang keliru, atau kedua-duanya.

Seseorang dapat berekspektasi bahwa sebentar lagi akan turun hujan karena memperoleh asumsi dengan melihat tanda-tanda alam, yaitu adanya awan hitam yang tebal disertai kilat dan suara geledak. Asumsinya, kemunculan tanda-tanda itu biasanya akan diikuti oleh turunnya hujan. Asumsinya benar, namun boleh jadi perhitungannya meleset karena tiba-tiba muncul angin kencang yang menghalau awan hitam tersebut yang menyebabkan hujan tidak jadi turun di tempat orang itu berada.

Selain itu, seseorang berekspektasi bahwa harga-harga akan naik di masa depan jika faktor-faktor pendorong kenaikan harga akan muncul di masa depan. Harga cabe, beras, dan komoditas pangan lainnya akan naik jika cuaca akan memburuk, atau jika harga bahan bakar alat transportasi akan naik. Asumsinya benar dan proyeksinya akan mendapatkan berapa besar kenaikan harga-harga komoditas pangan tersebut. Namun, perhitungannya dapat meleset dan

ekspektasinya tidak terwujud apabila cuaca, karena kekuatan alam, tidak jadi memburuk atau pemerintah tiba-tiba membuka keran impor terhadap komoditas pangan tersebut sebelum pemberlakuan kenaikan harga bahan bakar.

Mengetahui seberapa besar ekspektasi, sangat bermanfaat bagi perumus kebijakan, termasuk Bank Indonesia (BI). Ya, BI sangat berkepentingan dengan besaran angka ekspektasi karena ekspektasi menjadi salah satu variabel dalam formula perhitungan inflasi inti yang merupakan

“BI sangat berkepentingan dengan besaran angka ekspektasi karena ekspektasi menjadi salah satu variabel dalam formula perhitungan inflasi inti yang merupakan bagian dari Indeks Harga Konsumen (IHK).”

bagian dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Sekadar mengingatkan bahwa BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin antara lain dengan laju inflasi.

Angka ekspektasi inflasi tidaklah mudah untuk diperoleh. Tidak banyak lembaga yang memproduksinya. Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian besar lembaga-lembaga lain hanya menghasilkan angka “masa lalu”, seperti jumlah produksi yang telah dihasilkan atau jumlah barang yang telah dikonsumsi, dan bukan angka “masa depan”, seperti ekspektasi dan proyeksi.

Untuk mendapatkan besaran angka ekspektasi tersebut, BI menggunakan angka yang berasal dari sumber perhitungan internal dan eksternal. Melalui perhitungan internal, BI menggunakan langkah-langkah sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Sebagai suatu angka statistik, angka ekspektasi haruslah dapat dipercaya, akurat, dan konsisten yang diperoleh dengan cara yang kredibel dan akuntabel.

Untuk itu Direktorat Statistik

Ekonomi dan Moneter (DSM) diberi tugas menghasilkan angka ekspektasi, melalui survey yang disebut dengan Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE). SK merupakan survei bulanan terhadap sekitar 4.600 rumah tangga di 18 kota, di Jakarta dan sejumlah ibukota propinsi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara telepon atau dengan tatap muka. Angka yang dihasilkan berupa indeks. Di atas 100 berarti responden optimis ada kenaikan, dan sebaliknya di bawah 100 artinya responden pesimis akan adanya kenaikan.

Selain melalui pendekatan konsumsi sebagaimana pada SK, ekspektasi harga dihitung melalui pendekatan produksi sebagaimana pada SPE. Survei tersebut dilaksanakan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan produksi sektor swasta, termasuk harga-harganya, terhadap sekitar 290 pengecer sebagai responden di lima kota besar. Sama seperti SK, pada SPE angka yang dihasilkan juga berupa indeks dengan penjelasan yang sama.

Pada responden kedua survei tersebut diajukan pertanyaan bagaimana perkiraan kenaikan harga barang/jasa secara umum dalam 3 bulan ke depan pada saat ini dibandingkan perkiraan kenaikan tersebut pada bulan sebelumnya. Hasilnya, masyarakat yang diwakili oleh responden-responden tersebut, dapat dikatakan mempunyai ekspektasi akan terdapat kenaikan harga apabila indeks bulan ini lebih besar dibandingkan indeks bulan sebelumnya, atau sebaliknya.

Dengan menggunakan besaran angka-angka ekspektasi tersebut ditambah angka ekspektasi yang berasal dari sumber eksternal, seperti Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari Danareksa Research Institute dan Global Nielsen Consumer Report dari AC Nielsen maka BI memperoleh masukan untuk dapat membuat proyeksi inflasi dan kemudian membandingkannya dengan target inflasi yang telah disepakati bersama pemerintah. Manakala terdapat hasil proyeksi yang berada di luar kisaran target, maka BI akan merumuskan kebijakan moneter yang sesuai. ●

*) Analis Senior di Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat

Mengatur Ekspektasi Inflasi

INFLASI itu tergantung dari ekspektasi kita juga lho...



Agar inflasi rendah dan stabil



KETAWA ALA BI

Mengenal Istri Setelah Menikah

Seorang anak bertanya ke ayahnya: "Aku mendengar bahwa di beberapa negara di Afrika, seorang pria tidak tahu istrinya sampai ia menikahinya?"

Ayah: "Itu terjadi di semua negara, Nak."

Anak: "Maksudnya.....????!!!" ●

Jenis Parfum Mewah

Seorang nenek masuk lift hendak ke lantai 6.

Di lantai 2 masuk gadis dengan aroma harum.

Nenek : "Baunya harum banget."

Gadis : "Merk BVLGARI, 2 juta per botol!" katanya pamer kepada Nenek.

Di lantai 4 masuk lagi seorang gadis, aromanya harum pula.

Nenek : "Baunya harum juga."

Gadis : "Merk GUCCI, 3,5 juta perbotol!"

Tiba di Lantai 6 Nenek keluar lift sambil kentut, membuat ke 2 gadis hampir pingsan karena baunya yang dahsyat...

Nenek berkata: "TERASI... 60 ribu per kilo...!!!" ●

Sopir Truk Pendiam

Suatu hari seorang sopir truk berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Ketika ia mendapat pesanan, segerombolan geng bersepeda motor datang dan mulai mengolok-olok sopir truk itu.

Sopir truk tidak melakukan apa-apa. Dia bangun membayar tagihan makan dan pergi.

Salah satu pengendara sepeda motor pergi ke kasir dan mengatakan "Dia bukan laki-laki."

"Tidak," kata kasir, "Dia bukan sekedar sopir biasa, dia tadi keluar dan telah melindas dua belas sepeda motor kalian." ●

ENTER

Dialog dengan SPG di pameran komputer :

"Mbak, mau tanya dong, 'ENTER' ini maksudnya apaan sih?"

SPG dengan sigap menjawab: "Sepertinya untuk mempercepat program, Mas!"

"Mempercepat gimana maksudnya, Mbak ?"

"Ya biar lebih cepat kerjanya mas... Kalau tulisannya 'ENTAR' jadinya lamaaaaa! ●

Meneropong Perkembangan Hukum Perbankan Indonesia

3 Jurus TPID Cirebon Kendalikan Harga Beras



Halim Alamsyah didampingi Dekan Fakultas Hukum UGM Marsudi Triatmodjo dan Wapemred InfoBank Eko B. Supriyanto.

Bisnis bank itu penuh aturan (*high regulated sector*). Setiap waktu aturan perbankan terus disempurnakan mengikuti perkembangan jaman. Hal ini dilakukan agar kesehatan dan keselamatan bank yang adalah institusi kepercayaan tetap terjaga. Guna memetakan sampai sejauhmana perkembangan hukum perbankan, Kantor Bank Indonesia (KBI) Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menjalin kerjasama menggelar seminar bertajuk “Dialog Perkembangan Hukum Ekonomi dan Perbankan Indonesia”. Acara yang diselenggarakan di Bangsal Mataram KBI Yogyakarta, 18 Februari lalu, sekaligus merupakan bagian dari temu alumni dan *Dies Natalis* ke-65 Fakultas Hukum UGM.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah dalam presentasi bertajuk “Hukum Perbankan Indonesia: Perkembangan & Agenda Ke Depan” memaparkan peran bank sentral selaku otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan dalam mengatur *prudential governance*. Pengaturan itu dilakukan mulai dari *entry policy*, *competition*, *prudential supervisory* hingga *exit policy*. Aplikasi regulasi hukum perbankan di dalam negeri sudah pula merujuk standar internasional seperti *Basel Accord* dalam hal pengawasan perbankan. Menurut dia, ketatnya hukum perbankan dikarenakan karakteristik usaha bank yang berbeda dengan perusahaan umum sehingga perlu dikelola secara hati-hati. BI juga memandang penting sokongan dan kerjasama dengan FH UGM dalam hal riset hukum perbankan di dalam negeri guna membidik visi penegakan hukum dan terwujudnya sistem perbankan yang aman.

Halim Alamsyah juga berharap agar topik hukum perbankan dapat menjadi salah satu ke-khususan dalam materi kurikulum pengajaran di FH UGM. Dalam seminar itu hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo, Kepala Pembinaan Hukum Nasional Wicipto Setiadi, Para Guru Besar FH UGM serta 250 alumni dan mahasiswa FH UGM lainnya yang hadir. ●



Halim Alamsyah menyerahkan cinderamata kepada Dekan Fakultas Hukum UGM Marsudi Triatmodjo.



Harga beras melangit justru di sentra produksi beras. Kok bisa? Ya, begitulah kenyataan yang terjadi di Kota Cirebon dan sekitarnya yang nota bene adalah salah satu penghasil beras nasional. Bisa dibayangkan bila kenaikan harga beras selama 2010 rata-rata 17,34%. Untuk melacak kenapa hal itu bisa terjadi, Kantor Bank Indonesia (KBI) Cirebon pernah melakukan penelitian. Riset itu memperlihatkan fakta bahwa beras hasil produksi empat daerah penghasil beras di sana (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) banyak ke luar wilayah Cirebon. Rupanya, letak geografis Cirebon yang tidaklah terlalu jauh dengan pasar induk beras di Cipinang-Jakarta membuat tingginya ekspektasi harga jual di tingkat pedagang di empat kabupaten tersebut. Walhasil, harga jual beras di Cirebon pun merujuk harga Cipinang.

“Selain itu, isu krisis pangan global juga menjadi faktor yang ikut mengancam situasi pangan di tahun 2011,” ujar Sekretaris Daerah Kota Cirebon pada pertemuan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon yang digelar di KBI Cirebon, 10 Februari 2011. Kenyataan tingginya harga beras inilah yang bikin pusing Pemda dan TPID Cirebon. Salah satu solusi dari pertemuan TPID bahwa pengendalian harga harus diupayakan dari hulu hingga hilir yang memunculkan gagasan penjajakan kerjasama niaga beras antar-kota dan kabupaten. Seraya menanti realisasi kerjasama itu, TPID mengeluarkan 3 (tiga) langkah pengendalian harga beras, yakni: pemantauan stok beras setiap bulan, intensitas komunikasi publik via media bahwa stok beras aman, dan upaya meningkatkan operasi pasar Perum Bulog/Dolog. ●



Lahan pertanian sayuran di Sei Temiang.

Klaster Sayur Organik Ikut Redam Inflasi

Pepatah Jawa kuno mengatakan, “alonalon asal kelakon.” Maksudnya, setiap rencana hendaknya ditapaki selangkah demi selangkah hingga mencapai tujuan. Filosofis petuah inilah yang coba diserap oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Batam bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat guna meredam gejala inflasi di daerah yang bertetangga dengan Singapura itu. Maklumlah, salah satu sumber pemicu inflasi di sana ternyata dari kelompok sayur yang kurun waktu lima tahun terakhir mencapai angka 21% (*year on year/yooy*).

KBI Batam dan TPID menyaksikan bahwa lahan pertanian di lokasi tersebut terus mengalami penyusutan hingga tinggal 0,7% dari luas wilayah. Sedangkan luas lahan untuk industri mencapai 70% dari luas wilayah. Dengan kondisi seperti itu, Batam terpaksa mendatangkan 100 ton sayur-mayur per hari dari total 120 ton kebutuhan per hari dari Sumatera Barat, Riau, dan lainnya. Hanya sebagian kecil (25%) saja yang bisa dipasok dari produksi sayur lokal.

Bisa dibayangkan bila sedikit saja terjadi gangguan pasok, harga-harga sayur akan meroket. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan itu, KBI Batam, Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) mengembangkan



Dari kanan ke kiri: PBI Batam (Elang Tri Praptomo), Deputi PBI Batam (Uzersyah) dan Direktur Eksekutif DSNI Amanah (Ir. Moch. Arief).

budidaya pertanian. Caranya dengan menggagas tumbuhnya sentra budidaya sayur di kawasan Sei Temiang yang kebetulan banyak pelaku UMKM yang memiliki keahlian di bidang budidaya pertanian dan siap dibina agar berkembang menjadi usaha skala menengah.

Sejak tahun 2010, tapakan dimulai dengan gagasan membentuk klaster sayur organik yang dikelola 7 petani di lahan milik Pemda Batam seluas 3 hektar dari 11 hektar yang tersedia di kawasan Sei Temiang. Langkah berikutnya di tahun 2011, diarahkan menuju embrio klaster yang bisa menjadi pemimpin pasar (*market*

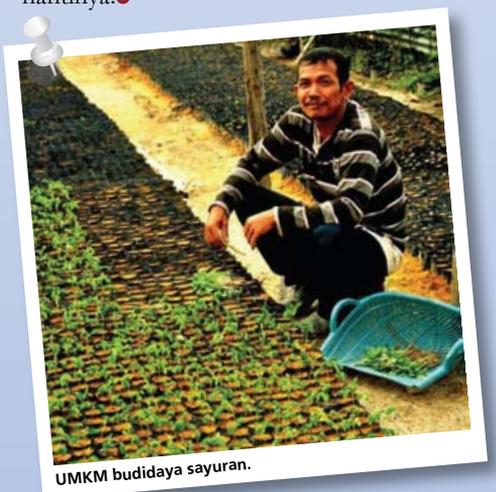
leader) produksi sayuran di Batam. Dan di tahun 2012 diharapkan sudah menjadi klaster sayur terpadu dengan kemampuan sebagai stok penyangga (*buffer stok*) urusan persayuran di Batam. Inilah proyeksi tiga tahun akan klaster sayur yang sedang dirintis setapak demi setapak oleh KBI Batam.

Petani sayur binaan KKMB dan KBI Batam di Sei Temiang sudah merasakan manfaatnya. Kelompok petani anggota koperasi memperoleh bagi hasil dari penjualan hasil panen sebesar Rp 128 ribu/hari/petani atau sebesar Rp 3,84 juta/bulan/petani. Petani cukup diuntungkan dari pola kemitraan tersebut, karena aspek pemasaran langsung ditangani oleh Koperasi KKMB binaan KBI Batam. Koperasi memberikan bimbingan kepada kelompok petani untuk teknik budidaya dan pola tanam yang memungkinkan ketersediaan pasokan sayur yang dibutuhkan oleh pasar.

Hasil pertanian seperti kangkung, bayam hijau dan merah, daun bawang, caysim, pakchoy, sawi, selada kriting, kailan dan daun sop rata-rata 130 kg/hari atau 47,5 ton/tahun. Sayur-sayur ini sudah dipasarkan di beberapa *super-market* besar di Batam.

Sisanya dipasarkan di pasar tradisional. Walaupun masih belum mampu terlalu banyak ‘menambal’ kekurangan kebutuhan sayur di Batam, namun upaya budidaya sayur ini menjadi contoh yang baik pengembangan komoditas sayur. Alhamdulillah, entah ini suatu kebetulan atau bukan, pergerakan harga (inflasi) sayur di Batam memperlihatkan indikasi tren penurunan di tahun 2010. Apakah ini karena klaster sayur tersebut? Memang masih harus diteliti lebih lanjut.

KBI Batam masih menyimpan mimpi di tahun 2012 mendatang akan terbentuk klaster sayuran organik terpadu dan diharapkan menjadi *buffer stock* yang mampu mengendalikan harga dan pasok sayur saat terjadi kelebihan atau kekurangan pasok. Dan bila mimpi itu terwujud akan membantu lebih meredam inflasi di Batam nantinya. ●



UMKM budidaya sayuran.